



Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jap>

Politik Identitas pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018

Politics of Identity in the Election of the Governor of North Sumatra in 2018

Sayed Muhammad Daulay^{1*)}, Heri Kusmanto²⁾ & Abdul Kadir³⁾

¹⁾ Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

²⁾ Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

³⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Medan Area, Indonesia.

Diterima: Februari 2019; Disetujui: Mei 2019; Dipublish: Juni 2019

*Corresponding Email: [sayed12@gmail](mailto:sayed12@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan proses politik identitas yang terjadi pada pemilihan gubernur di Sumatera Utara tahun 2018. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses politik identitas dan pola politik identitas mempengaruhi jalannya pesta demokrasi antara kedua pasangan calon yang berkontestasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan. Temuan penelitian ini adalah: (1) Proses politik identitas dilakukan oleh tim ERAMAS dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh adat dan agama, sedangkan tim DJOSS hanya melakukan proses politik identitas dengan mendekati tokoh adat di berbagai daerah; (2) Pola-pola politik identitas pada tim ERAMAS dilakukan dengan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keislaman, seperti safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, Dzikir Akbar, fasilitas mobil pemembersih masjid, gerakan subuh berjamaah, dan perwiritan, dan ikut terlibat di dalam kegiatan adat, sedangkan tim pemenang DJOSS melakukan pola pada bentuk kegiatan yang berhubungan dengan adat di berbagai daerah dan ikut terlibat pada kegiatan adat, untuk pola keagamaan hanya melakukan kunjungan kepada tokoh agama di daerah.

Kata Kunci: Politik Identitas, Pemilu Kepala Daerah, Etnisitas, Agama.

Abstract

This study explains the process of identity politics that occurred in the gubernatorial election in North Sumatra in 2018. The purpose of this study is to look at the process of identity politics and patterns of identity politics influencing the course of democratic parties between contesting candidate pairs. This study uses a descriptive method that focuses on the actual problems or phenomena that occur when the research is conducted. The findings of this study are: (1) The identity politics process was carried out by the ERAMAS team by evaluating traditional and religious leaders, while the DJOSS team only carried out the process of identity politics by using traditional leaders in various regions; (2) The patterns of identity politics in the ERAMAS team are carried out in the form of activities related to Islam, such as preaching safari with Ustadz Abdussomad, Dzikir Akbar, provider of mosque cleaning cars, subuh movement in congregation, and sanitation, and participating in traditional activities DJOSS's winning team patterned activities related to adat in various regions and were involved in traditional activities, for religious patterns only to visit religious leaders in the area.

Keywords: Identity Politics, Regional Head Election, Ethnicity, Religion.

How to Cite: Daulay, S.M., Kusmanto, H. & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*. 9 (1): 49 -56

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara serentak telah berlangsung di beberapa daerah pada tanggal 27 Juni 2018, termasuk pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023. Pemilihan kepala daerah yang diterapkan sejak tahun 2004 dalam pelaksanaannya sampai sekarang masih saja menimbulkan kekhawatiran bagi semua pihak. Kekhawatiran pilkada berpotensi menimbulkan perpecahan antara kelompok sosial masyarakat secara horizontal yang menyebabkan kepada timbulnya sebuah konflik, ketegangan dan bisa berujung pada sebuah kekerasan. (Peraturan Pemerintah No. 6/2005 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah).

Pemilihan kepala daerah sering menjadi arena utama antar kekuatan sosial-politik yang tidak jarang didasarkan pada sentimen suku dan agama (Anhaf, 2013). Simbol-simbol agama seringkali digunakan untuk mendapatkan kekuasaan politik yang menyebabkan munculnya karakter atau tokoh yang eksklusif, sehingga kemudian isu-isu yang akan dikembangkan kedepannya adalah isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) dilancarkan demi menguasai mayoritas penduduk dengan dalih menggunakan identitasnya.

Konsep identitas secara umum diartikan sebagai citra yang membedakan suatu individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya yang dibangun oleh individu/kelompok tersebut serta dimodifikasi secara terus menerus melalui interaksi dengan pihak-pihak lain (Keitzentein, 1996).

Dinamika politik lokal khususnya yang berada di ranah lokal, merujuk pada pilkada dan menjadi momentum yang mendorong peningkatan konflik keagamaan dan konflik sosial yang sedang berlangsung di suatu wilayah. Hal ini terjadi karena momen Pilkada menjadi

momentum pertemuan berbagai kepentingan politik dan kekuasaan yang terkonsentrasi pada konflik yang sedang berlangsung. Kepentingan politik tersebut bisa merupakan isu-isu yang sensitif atau suatu kelemahan dari pasangan lain untuk meraup suara yang lebih banyak.

Akibatnya tindakan tersebut dapat memecahkan kondisi sosial masyarakat sehingga isu-isu yang harusnya bersifat politis bisa melebar dengan masalah yang besar. Pentingnya memberikan perhatian terhadap dinamika politik lokal tidak bisa dilepaskan dari konteks desentralisasi di Indonesia yang menempatkan sumber daya kekuasaan begitu besar di ranah local (Anhaf, 2013).

Pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018, kepentingan politik bisa kita lihat ketika berbagai macam aksi yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok dalam kampanye. Issue adanya putra daerah yang harus memimpin Sumatera Utara dan isu bela Islam yang terus menerus tersiar. Seperti yang kita ketahui ada dua pasangan calon pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 yakni pasangan calon nomor urut satu Edi Rahmayady - Musa Rajeckshah dan pasangan nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat - Sihar Sitorus.

Akibatnya kepentingan yang bermain adalah menggunakan ulama yang bisa dijadikan tokoh politik untuk mendulang suara melalui isu-isu SARA, seperti yang kita ketahui juga bahwa lawan politik Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah adalah pasangan muslim dan nonmuslim, sehingga sangat mudah dalam memunculkan isu politik identitas oleh tim pemenang salah satu calon dalam mendulang suara dan juga isu putra daerah Sumatera Utara karena Calon Gubernur nomor urut dua Djarot Saiful Hidayat merupakan calon yang datang dari pulau Jawa dan juga merupakan calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017,

ditambah dengan isu penistaan bersama Basuki Tjahja Purnama.

Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi (Castells, 2010), (Castells, (2005). Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibayangkan semua politik adalah politik identitas (Hall, 1995) (Hall, 2005). Politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan *political of identity* mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Ambardi, 2011).

Politik identitas juga merupakan suatu bentuk dari pilihan politik yang berdasarkan perbedaan atau persamaan logika (Laclau Moufe, 2008). Lebih lanjut dijelaskan bahwa politik identitas lebih kepada sikap politik yang berfokus pada sub-kelompok dan merujuk pada aktivisme atau merujuk pada pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya (Ubed, 2002).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Nawawi, metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat (Nawawi, 2004). Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif agar memudahkan peneliti untuk menggambarkan kondisi Pemilihan kepala daerah Sumatera Utara 2018. Teknik

pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Dengan teknik analisis data memilah data secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan konsep dan teori yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pasangan nomor urut satu saat proses melakukan penggalangan isu untuk mendapatkan respon terhadap minat masyarakat dalam memilih, proses tersebut sebagian besar dilakukan oleh calon wakil gubernur Musa Rajeckshah, berbeda dengan pasangan calon nomor urut dua yang membagi porsi yang melakukan isu keindonesiaan dan mengunjungi tokoh-tokoh muslim adalah Djarot Saiful Hidayat, sedangkan Sihar P. Sitorus lebih ke pada penggalangan isu kepemudaan dan masyarakat Batak yang berada di pantai barat yang mayoritas Kristen.

Secara definisi politik identitas diartikan lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang pada umumnya diwakili oleh elite-elite (Syafi'i, 2012).

Peneliti menemukan bahwa pada saat kampanye bahwa proses politik identitas yang mencakup etnisitas dan agama dilakukan oleh para elite-elite dalam rangka proses penggalangan isu untuk memenangkan setiap pasangan calon masing-masing.

Kedua pasangan calon gubernur melakukan kunjungan baik ke daerah-daerah, komunitas, organisasi masyarakat dan membangun simpul-simpul di setiap tempat yang mereka anggap strategis untuk menggalang isu dengan melakukan konsolidasi dengan setiap tokoh masyarakat setempat, baik itu tokoh agama atau tokoh daerah yang dikunjungi oleh masing-masing tim pasangan calon. Proses-proses penggalangan isu baik dari program, masalah sosial, etnik dan agama sengaja

diciptakan oleh tim untuk melakukan kegiatan kunjungan yang akan di kunjungi pasangan calon dan memberikan efek kepada masyarakat dari proses kunjungan.

Proses penggalangan isu untuk menarik minat pemilih yang dilakukan oleh tim pemegang dengan melalui tahapan stimulus, organism, dan respon (Efendi, 2002), dari stimulus yang dilakukan selama masa sosialisasi pemilu oleh para tim pemenangan dan elite-elite daerah dari setiap pasangan, kemudian objek dari stimulus tersebut adalah masyarakat Sumatera Utara yang selanjutnya dengan hasil out put adalah respon yang menjadi minat pemilih dari masyarakat Sumatera Utara.

Proses pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ada kesamaan proses penggalangan isu yang dilakukan oleh kedua tim pasangan calon, baik itu dari proses penggalangan isu etnisitas, agama, komunitas, ormas juga dengan kelompok-kelompok kepentingan.

Etnisitas

Etnisitas atau kesukuan berpengaruh besar pada keterpilihan pasangan calon pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara tahun 2018, keterlibatan pemilih untuk memilih pemimpin yang berdasarkan suku juga menjadi hal yang tidak bisa dipaksa, karena pemilih akan memilih pemimpin yang merasa paling dekat dengan mereka. Proses penggalangan isu-isu etnisitas yang dilakukan oleh tim pasangan calon dengan memberikan stimulus isu-isu etnisitas pada saat proses sosialisasi baik itu dengan mengunjungi tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat setempat, juga dengan membuat isu bahwa pasangan calonnya adalah orang yang berasal dari daerah Sumatera Utara.

Proses penggalangan isu yang dilakukan oleh tim ERAMAS dengan memberikan stimulus kepada masyarakat menyatakan bahwa Edi Rahmayadi – Musa Rajekshah merupakan putra asli daerah yang tumbuh di Sumatera Utara, ditambah

lagi dengan menyatakan bahwa Edi Rahmayadi berasal dari suku Melayu-Jawa, kemudian Musa Rajekshah yang berdarah Melayu-Pakistan. Sedangkan isu yang dibangun oleh tim ERAMAS kepada pasangan calon nomor urut dua adalah Djarot orang pendatang dari luar Sumatera yang tidak paham dengan kondisi yang ada di Sumatera Utara, dan menyatakan Sumatera Utara tidak butuh calon impor karena masyarakat Sumatera Utara masih memiliki putra daerah yang layak untuk memimpin Sumatera Utara. Ditambah lagi dengan permasalahan e-KTP yang didapatkan oleh Djarot yang mendapatkan respon negatif dari sebagian besar masyarakat Sumatera Utara dengan permasalahan waktu itu yang sulit untuk mendapatkan e-KTP yang hanya digantikan dengan selembar kertas dan masa berlaku mencapai enam bulan menambahkan asumsi dari masyarakat bahwa KTP yang didapatkan oleh Djarot tidak melalui prosedur yang benar.

Proses penggalangan isu yang dilakukan oleh tim DJOSS juga dengan cara yang sama dengan memberikan stimulus kepada masyarakat menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk menjadi kepala daerah dan kehadiran Djarot untuk memperbaiki permasalahan birokrasi yang ada di Sumatera Utara yang masih dikenal dengan permasalahan korupsi, kemunculan nama Djarot juga tidak terlepas dari deklarasi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia pada tanggal 10 Januari 2018 di media online Medan Today, yang melalui pernyataan ketua umumnya adalah kehadiran Djarot yang bersuku Jawa di Sumatera Utara untuk menjadi kepala daerah, dan kehadiran Sihar untuk keterwakilan suku Batak, pernyataan tersebut mempunyai alasan yang pasti karena hampir 32% masyarakat Jawa di Sumatera Utara, sedangkan Batak yang tergabung Mandailing, dan Karo memiliki jumlah persentase sebanyak 41%.

Sedangkan isu yang dibangun oleh tim DJOSS kepada pasangan calon nomor urut satu terfokus pada calon wakil gubernur Musa Rajekshah, isu yang dibangun oleh tim djoss adalah Musa adalah juga pendatang dari luar yang bersuku asli timur tengah, akan tetapi isu yang tersebut bisa ditutup melalui pernyataan dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara pada saat pendaftaran calon gubernur dan juga ada di dalam hasil wawancara peneliti dengan mantan komisioner KPU Nazir Salim Manik yang menyatakan bahwa dari kedua pasangan calon gubernur tersebut hanya Musa Rajekshah-lah yang orang asli Sumatera Utara, pernyataan tersebut dikeluarkan oleh KPU di karenakan pada saat itu hanya Musa Rajekshahlah yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk Sumatera Utara sedangkan ketiga yang lain belum memegang kartu identitas Sumatera utara.

Proses penggalangan isu yang berdasarkan etnisitas juga sama dilakukan oleh tim DJOSS, gerakan yang dilakukan dengan menjumpai tokoh-tokoh adat yang dilakukan untuk mendapatkan respons dan hubungan kedekatan dengan masyarakat etnis tertentu sehingga dapat menjangring suara dari masyarakat tertentu.

Agama

Pemilihan gubernur Sumatera Utara tidak terlepas dengan isu agama yang dilakukan oleh kedua pasangan tim pemenangan, tidak ada deklarasi yang dilakukan oleh ormas yang berbau agama pada saat masa kampanye dalam menggalang isu kedua pasangan calon, akan tetapi masing-masing tim pasangan calon melakukan dengan stimulus yang lebih halus yakni dengan menunjukkan bahwa pasangan calon tersebut peduli dengan umat agama tertentu.

Proses penggalangan isu yang dilakukan oleh para elit adalah menciptakan banyak tokoh-tokoh baru pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara, bahkan memang sudah ada tokoh yang dikenal oleh masyarakat banyak

sehingga itu menjadi alat oleh para elit untuk meraih respon terhadap minat pemilih.

Proses penggalangan isu agama dilakukan oleh pasangan nomor urut satu melanjutkan politisasi identitas pada pemilihan gubernur DKI Jakarta, hal ini dilakukan oleh tim pemenangan melihat peluang dari pasangan calon nomor urut dua yang memilih Djarot sebagai calon gubernur Sumatera Utara yang kita ketahui sebelumnya adalah calon wakil gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama yang tersandung kasus penistaan agama.

Proses penggalangan isu yang dilakukan oleh tim pemenangan dengan menghadiri kegiatan yang bernuansa Islami dan melakukan kunjungan-kunjungan yang berhubungan dan berkaitan dengan agama, pada pasangan calon nomor urut satu proses penggalangan isu yang dilakukan pada kegiatan keagamaan lebih berfokus pada kegiatan tausyiah, perwiritan, dan kunjungan ke tempat yang terkait dengan agama seperti pesantren dan ziarah kubur ulama-ulama besar.

Penggalangan isu yang bernuansa keagamaan pada pasangan nomor urut satu banyak dilakukan oleh Musa Rajekshah, hal ini karena memang dengan sifat Musa yang sudah terlebih dikenal santun oleh masyarakat dan memiliki hubungan perkawanan dengan salah satu tokoh dai yang sudah terlebih dahulu terkenal yakni USTADZ Abdussomad menjadi nilai lebih yang dimiliki oleh pasangan nomor urut satu, bahkan hubungan baik dengan para ulama dan ustadz tidak hanya dengan Ustadz Abdussomad tapi Musa Rajekshah juga memiliki hubungan yang baik dengan Ustadz Zulkarnain dan Ustadz Latif Khan.

Hubungan kekerabatan yang sudah ada sejak lama dengan Musa Rajekshah dan Abdussomad bukan terjalin pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara

melainkan hubungan yang sudah ada antara kakek Musa Rajeckshah yang sebelumnya juga ulama dan hafidz Quran dengan kakek Ustadz Abdussomad yang sama-sama menimba ilmu agama di Kisaran. Sehingga niat yang baik juga dari Ustadz Abdussomad untuk membantu dalam memenangkan pasangan calon nomor urut satu pada pemilihan gubernur Sumatera Utara, sehingga tim melihat peluang dan memasukkan agenda ketika safari dakwah Ustadz Abdussomad yang berada di Sumatera Utara selalu dihadiri oleh calon wakil gubernur nomor urut satu.

Posisi Musa Rajeckshah sebagai ketua Yayasan Haji Anif juga memudahkan tim pasangan calon nomor urut satu dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, bahwa yayasan di bawah naungan Musa Rajeckshah memberikan perhatian lebih ke tempat ibadah umat muslim dengan melakukan pembersihan masjid gratis secara rutin, hal ini juga menunjukkan bahwa pasangan nomor urut satu benar-benar peduli dengan kebersihan akan tempat ibadah.

Kunjungan pasangan calon nomor urut satu ke pesantren Mustafawiyah di kabupaten Mandailing Natal dan menginap di rumah pemilik pesantren Mustafawiyah, tim pasangan calon di sini juga ingin menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut satu memiliki jiwa yang sederhana dan peduli akan pendidikan agama Islam bagi generasi muda sebagai penerus bangsa kedepan.

Isu yang dibangun oleh tim ERAMAS terhadap pasangan calon nomor urut satu adalah pemimpin yang peduli akan umat, hal itu jelas dilakukan pada masa kampanye dan hampir tidak ada kegiatan yang bernuansa Islam yang tidak di datangi oleh mereka, baik itu yang perwiritan pengajian ibu, kunjungan ke pesantren di Sumatera Utara, dan kunjungan ke ziarah kubur di Barus dan Labuhan Batu Utara.

Puncak penggalangan isu untuk memilih pemimpin yang seiman dilakukan oleh tim pemengan ERAMAS pada tanggal 23 Juni 2018 ketika rapat umum terakhir yang diganti mejadi Dzikir Akbar dengan tema "*Doa untuk Sumut Bermartabat*" yang dihadiri oleh Ustadz Abdussomad, Ustadz Zulkarnain, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, dimana dalam aksi dan orasi tersebut seruan kepada kepada umat muslim untuk memenangkan pemimpin yang sesama akidah dan memilih pemimpin yang asli dari putra daerah Sumatera Utara.

Proses penggalangan isu pada agama tidak terlalu masif digunakan oleh tim DJOSS, hal ini juga sebelum juga peneliti sampaikan pada wawancara bersama Fuad Perdana Ginting bahwa etnis dan agama memiliki porsi yang besar pada saa pemilihan gubernur Sumatera Utara, tetapi rangkain tim Djoss lebih berfokus kepada program dan pendekatan kepada etnis di Sumatera Utara bukan berarti tim Djoss tidak melakukan pendekatan melalui agama pada saat pemilihan gubernur Sumatera Utara.

Proses penggalangan isu dilakukan juga oleh wakil gubernur nomor urut dua Sihar P. Sitorus, penggalangan isu yang dilakukan oleh Sihar adalah dengan mengunjungi gereja dan Taman Wisata Iman dengan tujuan yang sama dengan pihak pasangan nomor urut satu, jika Musa Rajeckshah ingin merebut simpati dari masyarakat muslim maka Sihar P. Sitorus juga melakukan hal yang sama untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Kristen yang ada di Sumatera Utara, tidak menutup kemungkinan juga bahwa calon wakil gubernur dari nomor urut dua mengunjungi acara buka puasa bersama untuk menunjukkan sikap toleransi dari Sihar terhadap kerukunan dalam beragama yang dilakukannya di Padang Sidempuan bersama Raja Luat.

Penggalangan isu juga dilakukan oleh Djarot dengan mengunjungi tokoh agama di Labuhan Batu Utara, gerakan dalam

mencari dukungan untuk menarik pemilih yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut dua hanya sebatas dengan mengunjungi tokoh-tokoh agama, tidak ada bentuk gerakan yang masif dilakukan seperti pasangan calon nomor urut satu seperti menghadiri langsung sebuah acara yang berkaitan dengan agama untuk posisi yang dilakukan oleh calon gubernur nomor urut dua, sehingga penggalangan isu tersebut tidak terlalu tampak kepada masyarakat bahwa pasangan calon nomor urut dua juga peduli terhadap umat.

Model politik identitas pada segi etnisitas dengan menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut satu adalah putra asli Sumatera Utara dengan isu yang dibangun oleh tim adalah Edi Rahmayadi adalah keturunan yang berdarah Melayu-Jawa sedangkan wakilnya Musa Rajekshah adalah putra kelahiran Sumatera Utara dengan keturunan berdarah Melayu-Pakistan. Pernyataan seperti itu ada untuk meyakinkan masyarakat bahwa Sumatera Utara masih memiliki putra daerah terbaik.

Bentuk politik identitas yang dilakukan tim ERAMAS pada keagamaan, langkah awal yang dilakukan adalah dengan mendata dai, imam dan ustadz yang berada di Sumatera Utara melalui Yayasan Haji Anif, selanjutnya dai dan imam masjid ketika melakukan ceramah di masjid-masjid untuk menganjurkan memilih pemimpin yang sesuai akidah dan menjelaskan larangan untuk tidak memilih pemimpin kafir.

Pada kegiatan tausyiah atau dzikir akbar pasangan calon nomor urut dua yakni Musa Rajekshah selalu menghadiri kegiatan yang seperti itu untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa beliau memang peduli akan kondisi umat, dan selalu mendampingi Ustadz Abdussomad ketika melakukan safari dakwah di Sumatera Utara.

SIMPULAN

Proses politik identitas dilakukan oleh tim Eramas dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh adat dan agama, sedangkan tim djoss hanya melakukan proses politik identitas dengan mendekati tokoh adat di berbagai daerah.

Pola-pola politik identitas pada tim eramas dilakukan dengan bentuk kegiatan yang berhubungan dengan keislaman, seperti safari dakwah bersama Ustadz Abdussomad, Dzikir Akbar, fasilitas mobil pembersih mesjid, gerakan subuh berjamaah, dan perwiritan, dan ikut terlibat didalam kegiatan adat. Tim pemenang djoss melakukan pola pada bentuk kegiatan yang berhubungan dengan adat di berbagai daerah dan ikut terlibat pada kegiatan adat, untuk pola keagamaan hanya melakukan kunjungan kepada tokoh agama di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M.I. (2015). *Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan Pilkada Dan Struktur Kesempatan Politik Dalam Konflik Keagamaan Di Sampang, Bekasi, Dan Kupang*.
- Ambardi, K. (2011). *How Smart Can We Go? The Quality of Campaign Information in the 2009 Presidential Election*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 14. No. 3.
- Azhar, A.A. (2017). *Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat*. Yogyakarta: Atap Buku
- Bagir, Z.A. (2011). *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman Indonesia*. Bandung-Yogyakarta: Mizan dan CRCS
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. New York: Oxford University Press.
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Chichester: Wiley-Blackwell
- Hall, S. (1992). "The Question of Cultural Identity" dalam *Modernity and Its Futures*. Hall, Stuart. Held, David. dan McGrew, Tony (ed). London: Polity Press.
- Hall, S. (2005). "Who Need "Identity"?" dalam *Identity: a Reader*. Gai, Paul Du. Evans, Jessica. dan Redman, Peter (ed). London: Sage Publications.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. University Press.

- Kellner, D. (1995). *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between The Modern and The Postmodern*. London: Routledge.
- Kristianus (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat, *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1 (1): 87-101.
- Lukmantoro, T. (2008). *Kematian Politik Ruang*. Jakarta: Kompas
- Maarif, A.S. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democrazy Project edisi digital.
- Maleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda
- Nawawi, H. & Hadari, M. (2004). *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setyaningrum, A. (2005). "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005
- Tanasaldy, T. (2007). "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat" dalam *Politik Lokal di Indonesia* (ter.). Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van (Ed). Jakarta: Obor.
- Ubed, A.S. (2002). *Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang: Indonesiater.
- Von Beyme, K. (1996). Biopolitical ideologies and their impact on the new social movements. *Public Policy And Social Welfare*, 19, 113-132.